

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia harus dimiliki oleh semua orang. Pendidikan dapat dilakukan tanpa mengenal batas usia, ruang dan waktu. Pendidikan juga tidak memperkenankan pembatasan kegiatan atau bentuk, semua kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tertentu, sehingga semua warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu baik itu yang diselenggarakan oleh lembaga negara dan non-negara.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Maka dari itu pendidikan sekali lagi ditekankan sangatlah penting bagi setiap masyarakat tak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus.

Istilah anak berkebutuhan khusus bukanlah istilah baru, tetapi telah digunakan secara luas selama bertahun-tahun untuk menggambarkan siswa dengan keterbatasan fisik dan mental sehingga mengalami hambatan belajar. Ketika wajib belajar diperkenalkan dan ditetapkan oleh pemerintah, anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas dianggap tidak layak untuk masuk sekolah umum, mereka dianggap tidak sama sehingga dipandang tidak mampu mengikuti kegiatan belajar, dikucilkan oleh masyarakat, dan sering ditolak. Namun, pada akhirnya pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) disahkan dalam undang-undang, sehingga hak pendidikan mereka sama dengan mereka yang non-ABK.

Hak atas pendidikan bagi ABK atau anak difabel ditetapkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 disebutkan bahwa: “Pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti

proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial”. Maka anak-anak yang memiliki keterbatasan seperti ini di dalam pendidikannya memiliki sebuah lembaga kependidikan khusus yang bertujuan untuk memperluas kesempatan kepada anak-anak yang memiliki keterbatasan ataupun keistimewaan untuk belajar, sehingga mereka dapat membekali diri untuk dapat mandiri dan berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa dan negaranya.

Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terhadap pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus, Pemerintah memberikan fasilitas sekolah yang dikenal dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan spesialisasinya. Yang termasuk kedalam anak berkebutuhan khusus ini salah satunya adalah tunanetra atau anak yang mengalami gangguan penglihatan. Pendidikan khusus yang ideal untuk siswa tunanetra tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan luar biasa pasal 16 ayat 3, yang memberikan arahan bahwa dalam menentukan kurikulum Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa diupayakan sama dengan kurikulum yang ada pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Namun demikian, dalam menetapkan isi kurikulum mengingat kenyataan tingkat kemampuan atau keterbatasan siswa sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa dengan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama berbeda, maka isi kurikulum tersebut harus tetap dibedakan sesuai dengan kemampuannya (Rahmawati, 2016, hlm. 11).

Ketunanetraan pada siswa memang bisa menyebabkan keterbatasan seperti keterbatasan dalam segi kognitif, keterbatasan gerak dan keterbatasan dengan interaksi lingkungan. Dengan adanya masalah tersebut maka penyandang tunanetra memerlukan lembaga pendidikan khusus agar dapat membantu mengatasi permasalahan yang dialaminya. Lembaga pendidikan yang menangani anak berkebutuhan khusus seperti tunanetra salah satunya adalah SLB N-A Pajajaran Kota Bandung. Sejak tahun 1901, sekolah khusus tunanetra ini telah ada dan merupakan sekolah tertua di Indonesia. Kehadiran sekolah tunanetra ini merupakan solusi bagi siswa tunanetra untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak lainnya. Inilah mandat yang diberikan oleh Undang-Undang negara kita: bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, tidak mudah bagi seorang guru untuk mengajar anak berkebutuhan khusus. Jika guru tidak terbiasa dan memiliki kompetensi dalam menangani kegiatan proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus, maka yang diperoleh hanya berbagai kesulitan karena profesi tersebut tidaklah mudah. Seorang guru membutuhkan kurikulum pembelajaran khusus. Dalam hal ini kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan tujuan harus mampu menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dalam jiwa peserta didik.

Ilmu Pengetahuan Sosial adalah salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari karena dapat menumbuhkan sikap, kesadaran, kepedulian dan toleransi terhadap keragaman sosial budaya masyarakat bagi peserta didik. Oleh karena itu seorang guru Ilmu Pengetahuan Sosial harus berupaya untuk memilih dan mengembangkan metode pembelajaran yang tepat bagi anak yang memiliki hambatan penglihatan karena adanya perbedaan strategi dalam kegiatan mengajar dengan anak yang normal dalam memberikan materi IPS, sehingga dapat tetap menarik minat siswa untuk mempelajarinya.

Penggunaan metode pembelajaran *story telling* bisa diterapkan pada siswa tunanetra, dengan metode ini siswa diharapkan akan lebih tertarik, dan mudah memahami karena siswa akan mendengarkan sebuah cerita yang dibacakan oleh guru atau diberikan melalui media lain yang bisa dimanfaatkan. Kemampuan bercerita di sini sangat diperlukan karena semakin si pencerita memiliki keterampilan yang baik dalam bercerita, maka siswa akan lebih menyimak dan terbawa suasana, dimana hal ini nantinya akan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan melalui cerita tersebut.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis menyusun skripsi dengan judul "Upaya Menumbuhkan Pemahaman Konsep Pembelajaran IPS Melalui Metode *Story Telling* (penelitian tindakan kelas pada siswa tunanetra SMPLBN A kelas VIII Pajajaran Kota Bandung)".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Kebutuhan siswa tunanetra di SMPLBN A Pajajaran Kota Bandung terhadap metode pembelajaran baru yang menumbuhkan pemahaman konsep dalam mata pelajaran IPS.
2. Masih digunakannya metode pembelajaran klasik, sehingga menjenuhkan siswa.
3. Minimnya keterlibatan siswa untuk aktif dalam pembelajaran IPS.
4. Belum digunakannya metode pembelajaran *story telling* di SMPLBN A Pajajaran Kota Bandung.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan supaya dapat dikaji secara mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Penerapan pembelajaran IPS untuk siswa tunanetra melalui penggunaan metode *story telling*.
2. Upaya peningkatan kemampuan pemahaman konsep pembelajaran IPS peserta didik tunanetra dalam penelitian ini dibatasi pada peserta didik kelas VIII di SMPLBN A Pajajaran Kota Bandung.
3. Upaya peningkatan kemampuan pemahaman konsep pembelajaran IPS peserta didik tunanetra dalam penelitian ini dibatasi pada materi mobilitas sosial.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah persiapan belajar siswa pada pembelajaran IPS dengan penggunaan metode *story telling*?
2. Bagaimana pelaksanaan penggunaan metode *story telling* terhadap siswa kelas VIII SMPLBN A Pajajaran Kota Bandung?
3. Apa kendala dan solusi penggunaan metode *story telling* pada siswa kelas VIII SMPLBN A Pajajaran Kota Bandung?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persiapan belajar siswa pada pembelajaran IPS dengan penggunaan metode *story telling*.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penggunaan metode *story telling* terhadap siswa kelas VIII SMPLBN A Pajajaran Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi penggunaan metode *story telling* pada siswa kelas VIII SMPLBN A Pajajaran Kota Bandung.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penggunaan metode *story telling* dalam upaya peningkatan kemampuan pemahaman konsep pembelajaran IPS dan sebagai latihan serta pengalaman dalam mempraktekkan teori yang diterima di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

A. Untuk memberikan informasi kepada guru IPS di SMPLBN A Pajajaran Kota Bandung untuk memilih metode *story telling* untuk menumbuhkan kemampuan pemahaman konsep pembelajaran IPS pada peserta didik.

B. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman penelitian selanjutnya.